

**UPAYA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI) DALAM MENGATASI KONFLIK ETNIS  
ANTARA MUSLIM ROHINGYA DAN BUDHA RAKHINE DI MYNAMAR**

**(2011-2014)**

**RESUME**

Konflik suku Rohingya dan Rakhine muncul pertengahan abad ke-20. Status kewarganegaraan Rohingya tidak dipertegas dengan hukum imigran yang jelas. Terjadi penolakan dan pertentangan kewarganegaraan suku Rohingya di Bangladesh maupun Myanmar. Secara eksplisit, Rohingya merupakan kaum pendatang yang tidak memiliki kedaulatan sendiri. Rohingya mengalami diskriminasi dan tidak mendapat tempat yang layak di Myanmar. Myanmar menutup akses bagi keabsahan hukum legal imigran bagi warga Rohingya di bawah pemerintahan Junta militer. Rohingya bukan merupakan bagian dari Myanmar karena tidak diakui oleh pemerintah setempat.

Persoalan Budha Rakhine dan Muslim Rohingya sekilas mengarah kepada masalah genosida atau penghilangan suku tertentu yang bergerak dan tinggal dalam wilayah tertentu atau penyingkiran yang dilakukan oleh pihak lain dengan alasan kekuasaan. Rakhine melakukan penolakan terhadap warga luar yang mengancam kedaulatan wilayah Myanmar yang notabene di mana Rohingya memeluk agama Islam. Demikian persoalan kesukuan yang membatasi dan mengadakan perbedaan antara Budha Rakhine dan Muslim Rohingya

Pemerintahan Myanmar dikendalikan oleh warga negara pribumi yang beragama Budha. Sebelumnya warga Pribumi Myanmar sendiri pernah bertikai dengan pemerintah akibat kediktatoran pemerintah Junta militer. Dapat ditarik kesimpulan juga bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh Budha Rakhine terhadap Rohingya adalah menimbulkan

perasaan tidak aman di Myanmar lalu keluar dari wilayah tersebut. Terlihat jelas bahwa Myanmar masih menunjukkan sikap tertutup akibat warisan dari junta militer.

Konflik Etnis yang terjadi di Myanmar antara Muslim Rohingya dan Budha Rakhine sudah terjadi sebelum kemerdekaan Myanmar dan sampai saat ini konflik kedua etnis ini belum ada penyelesaiannya, hak Muslim Rohingya juga terabaikan dan tidak mendapat apresiasi yang berarti dari pemerintah Myanmar sehingga Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang merupakan badan Organisasi internasional yang bertujuan untuk melindungi aspirasi umat muslim yang ada diseluruh dunia mengambil posisi dalam peran sebagai mediator dalam memberikan resolusi bagi perdamaian kedua belah pihak dan mengupayakan perdamaian yang bersifat semu kearah yang lebih baik.

Untuk membahas permasalahan Etnis di Myanmar ini, penulis menggunakan Teori Resolusi Konflik guna mendeskripsikan sejauh mana OKI melakukan upaya dalam meminimalisir tingkat konflik antara Muslim Rohingya dan Budha Rakhine.

Upaya OKI dalam melakukan ekspansi bagi perdamaian antar kaum minoritas Muslim Rohingya dan Budha Rakhine di Myanmar, dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil. OKI mengalami kendala yang ditunjukkan dengan demo besar-besaran di Myanmar dan pemerintah Myanmar seolah bersikap konservatif serta menolak jalinan konsolidasi atau perdamaian kedua belah pihak (Rohingya dan Rakhine).

Dengan hal tersebut diatas dan sikap pemerintah, maka pergerakan OKI menjadi tidak leluasa dan sempit untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak. Di satu sisi masa transisi pemerintah Junta ke Demokrasi mengisahkan banyak catatan sejarah yang perlu dibenahi. Warga pribumi Myanmar sendiri mengalami kekerasan dari pemerintah Junta Militer. Myanmar mengalami masa terberat selama pemerintahan Junta dan menyimpan banyak persoalan serius. Myanmar menutup diri dari akses dunia luar selama pemerintahan

Junta, sehingga masa transisi ke demokrasi membawa keleluasaan bagi pihak eksternal untuk bergerak masuk ke Myanmar. Oleh karenanya OKI baru beroperasi pada tahun 2011. Myanmar menjadi tertutup akan sorotan internasional akan setiap pelanggaran yang terjadi di Myanmar yang memungkinkan kepada peradilan internasional dan tuntutan pertanggung jawaban mengapa Pemerintah hanya diam saja dengan upaya perdamaian dan tidak menunjukkan sikap aktif bagi penyelesaian konflik.

Kesepakatan demi kesepakatan dan pertemuan yang dilakukan oleh OKI dan Myanmar serta melibatkan PBB sebagai mediator, dapat dikatakan statis akan pencapaian perdamaian. Dinamika politik di Myanmar sendiri masih mengalami pergolakan dan ketidak stabilan lingkungan internal yang mengakibatkan konflik sehingga belum begitu tampak upaya *peace making dan peace building* yang dilakukan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, Myanmar sedikit pesimis untuk menerima bantuan yang diberikan oleh OKI bagi rekonstruksi pasca konflik, karena dugaan intervensi OKI secara bebas di Myanmar. Myanmar menghendaki penyelesaian masalah internal tanpa adanya pengaruh pihak luar. OKI pada pertemuan skala internasional memberikan bantuan dana yang digalang dari negara- negara anggota OKI bagi Rohingya maupun Budha Rakhine namun belum dipergunakan sebagaimana mestinya. Rekonstruksi akan terlihat sia-sia karena konflik yang terus menguat sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur di Myanmar.

OKI telah melakukan upaya yang signifikan dan menghormati nilai-nilai hukum internasional. OKI menunjukkan otoritas dan keberadaannya sebagai Organisasi Islam Dunia yang memberikan perhatian bagi perjuangan penindasan kaum muslim yang tertindas namun juga atas dasar kemanusiaan. OKI bahkan mendesak PBB dan organisasi kemanusiaan internasional lainnya untuk terlibat secara efektif. OKI mengadakan pertemuan juga dengan PBB dan memantau perkembangan konflik terus-menerus. OKI

telah berusaha dan berupaya bagi penegakan perdamaian di Myanmar meski penolakan dari pemerintah dan warga masyarakat Myanmar. keterlibatan pihak internasional harus tanggap dalam memberikan solusi bagi jutaan jiwa yang terancam akan kemelaratan dan kematian. Baiknya menjadi pijakan untuk memberikan sebuah wilayah kedaulatan sendiri bagi Rohingya agar dapat melangsungkan hidup negara tanpa intervensi dan pertikaian dengan warga negara lainnya. Dengan melihat bahwa penolakan demi penolakan dari negara-negara di dunia untuk menerima Rohingya sebagai warga imigran. Menjadi acuan bagi dunia internasional untuk bergerak lebih netral demi kepentingan hak asasi manusia. Demikian mengenai sebab akibat konflik Rohingya dan Rakhine hingga kepada upaya-upaya pendekatan perdamaian yang dilakukan oleh OKI sebagai pihak mediator.